



Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam
ISSN: 2339-207x (p); 2614-3798 (e)

Sejarah Perang Cumbok dan Perubahan Sosial di Aceh

Avicenna Al-Maududdy

Magister Sejarah Peradaban Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
E-mail: 22201021002@student.uin-suka.ac.id

Septian Fatianda

Pendidikan Sejarah, Universitas Serambi Mekkah, Aceh
Email: septianfatianda@serambimekkah.ac.id

Faez Syahroni

Ilmu Administasi Negara, Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh
Email: faez.syahroni.washliyahbna@gmail.com

Abstract

The Cumbok incident occurred in Aceh between Ulama and Uleebalang. Since Dutch colonialism, these two groups of people have always been at odds. The Uleebalang group has long been considered to be opposing the struggle of Acehese ulama and mujahideen fighters against the threat of Dutch colonialism. This background pushed the Cumbok war into a major war which as a result changed the social order of Acehese society. This research is historical research with a political approach by conducting historical investigations. Examining the events of the Cumbok War and the impact of social change of the war is the research objective. This research methodology is a literature review that utilizes various reference sources. The socio-political situation of Aceh after Indonesian independence, the process of the Cumbok War and an analysis of the impact of the Cumbok War on the transition of Acehese society will be presented in this article.

Keywords: Ulama, Uleebalang, Cumbok War, Social Change

PENDAHULUAN

Sultan, *uleebalang*, dan ulama adalah tiga kelompok elit masyarakat Aceh di masa Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam masyarakat Aceh, ketiga faktor-faktor ini mengendalikan dan menjaga keseimbangan antara sektor-sektor ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Pada saat Kesultanan Aceh Darussalam runtuh, ada sekitar 102 daerah ke-uleebalangan, yang diperintahkan oleh raja-raja kecil sangat berkuasa dan memiliki

kekuasaan absolut di setiap wilayah Aceh kecuali wilayah Aceh Lhee Sagoe atau Aceh Besar. Dengan merosotnya Kesultanan Aceh Darussalam dan kehadiran Belanda di Aceh¹.

Setahun berlangsungnya Perang Aceh dengan Belanda, gejala pengkhiantan ini telah muncul. Saat itu beberapa Uleebalang bersedia untuk menandatangani "Korte Verklaring", yang juga dikenal sebagai "Perjanjian Pendek". Tiga pasal utama dari perjanjian ini: loyal terhadap Ratu Belanda; kedua, menganggap musuh Belanda sebagai lawan dan sebaliknya; dan ketiga, mengikuti perintah dari Ratu Belanda dan para perwakilannya. Kesetiaan uleebalang ini mulai berkurang kepada sultan Aceh. Pada akhirnya, mereka meninggalkan sultan dan memihak Belanda, dengan mengadakan perjanjian internasional tanpa diketahui oleh Sultan².

Kata ulama adalah bentuk jamak dari kata Arab alim, yang berarti seseorang yang memiliki pengetahuan, ilmu, sarjana, pakar, atau ahli dalam bidang ilmu Islam. Predikat ini jelas diberikan kepada seseorang yang benar-benar menguasai bidang tertentu dari ilmu agama Islam. Prestasi besar ini tidak dapat dicapai dengan mudah. Sebaliknya, itu diberikan kepada individu yang telah menunjukkan kemampuannya untuk mempelajari berbagai aspek tertentu dari studi-studi Islam. Ulama diangkat menjadi *qadhi* dalam Kesultanan Aceh masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, bertahta (1607–1636). Jabatan *qadhi* ada dalam struktur pemerintahan menurut pengertian Islam. *Qadhi* juga tidak termasuk dalam ketua Mahkamah Agung, seperti sultan³.

Persidangan Mahkamah Agung sultan hanya dapat diterima jika *qadhi* hadir. Kasus kejahatan ringan, seperti pelanggaran dan perdata kecil, yang hanya dapat diputuskan oleh *qadhi* dan para ulama secara eksklusif, tanpa anggota majelis sultan lainnya. Sangat penting bagi semua anggota majelis untuk menghadiri sidang dalam kasus besar agar vonis dapat diputuskan oleh tim. Saat kerajaan Aceh didirikan, *Qadhi Malikul Adil* adalah seorang ulama yang mendampingi sultan atau sultanah yang bertanggung jawab atas kerajaan. Ini adalah praktik unik di Aceh karena ulama membantu sultan, serta ulama lokal turut serta mendampingi di setiap negeri (*nanggroe*), mukim, dan gampong (kampung).⁴

Uleebalang adalah raja di negerinya, mereka disebut raja, istilah "uleebalang" berarti panglima tentara, yang membawahi dan memberikan izin kepadanya untuk memimpin prajurit di wilayahnya. Selain itu, dia berfungsi sebagai kepala rakyat atau kepala daerah di wilayah yang dipercayakan oleh Sultan Aceh kepadanya. Dalam teorinya, *Uleebalang* berfungsi sebagai pejabat atau perpanjangan kekuasaan Sultan Aceh dengan dikukuhkan. Menurut "Qanun Meukuta Alam", Sultan tidak harus memberikan surat pengangkatan kepada uleebalang. karena ia mewarisi kedudukan leluhurnya. meskipun begitu Sebagai penghargaan atas posisi mereka, mereka juga diangkat sebagai "Raja" oleh Sultan. Uleebalang adalah panglima tentara di Aceh. Sultan Aceh juga memberinya tanggung jawab mengepalai *nanggroe* atau negeri.

Masa Kesultanan Aceh, Cumbok adalah wilayah yang disebut *nanggroe* V Mukim

¹ Snouck Hugronje, *Aceh Di Mata Kolonial* (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), 99.

² T. Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999), 195.

³ K.F.H. Van Langen, *Susunan Pemerintahan Aceh Pada Masa Kesultanan* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2002), 49.

⁴ Langen, *Susunan Pemerintahan Aceh Pada Masa Kesultanan*.

Cumbok dengan kepala daerahnya bernama Teuku Sri Muda Pahlawan Bentara Cumbok. Setelah Kesultanan Aceh runtuh, Cumbok adalah wilayah yang disebut *vangroe* V Mukim Cumbok, dengan Teuku Sri Muda Pahlawan Bentara Cumbok sebagai kepala daerahnya. Nama istilah *landschap* (kenegerian yang kemudian menjadi kecamatan) Cumbok terbentuk setelah kesultanan Aceh runtuh.

Landskap ini termasuk dalam *onderafdeeling Lam Meulo* atau kewedanan yang tergabung di dalam kabupaten atau di sebut *onderafdeeling* Pidie. Nama kenegerian Aceh adalah Cumbok selama pemerintahan Hindia-belanda. Namun, nama kepala daerah adalah *Zelbestuurder van Cumbok*. Dalam bahasa Aceh, orang menyebutnya Uleebalang Cumbok. Ia masih disebut sebagai Teuku Sri Muda Pahlawan Bentara Cumbok. Sebelum kemerdekaan Indonesia diumumkan, Teuku Sri Muda Pahlawan Bentara Cumbok Muhammad Daud memimpin Uleebalang Cumbok, yang juga dikenal sebagai Teuku Cumbok⁵.

Perselisihan antara uleebalang dan ulama meningkat sebelum Peristiwa Cumbok terjadi pada bulan Oktober 1945. Takut melihat gerakan rakyat yang dipimpin oleh ulama. Di rumah uleebalang Keumangan Teuku Bentara Keumangan Pocut Umar di Beuneun, para uleebalang berkumpul pada 22 oktober 1945. Dalam pertemuan ini, berbagai masalah yang mengancam posisi mereka dibahas. Mereka percaya bahwa negara yang telah diproklamkan itu akan membawa ancaman itu. Untuk melakukannya, mereka membutuhkan perlindungan dan persenjataan. Untuk mengatasi segala kemungkinan, diputuskan: (1) Menciptakan organisasi untuk menjaga kedudukan Uleebalang, yang disebut Markas Besar Uleebalang (2) agar beraksi dengan benar, maka dibuat juga Barisan Penjaga Keamanan (BPK), yang memiliki persenjataan lengkap yang hampir sempurna, bahkan lebih sempurna daripada senjata yang digunakan oleh pasukan pemerintah TKR⁶.

Perang Cumbok 1945–1946 adalah konflik di antara para ulama dan Uleebalang Aceh di dalamnya. Konflik ini terkonsentrasi di Pidie, antara kelompok uleebalang, atau bangsawan. Pada dasarnya, perang ini bertujuan untuk menghapus feodalisme di Pidie dan Aceh secara khusus⁷. Ada perbedaan pendapat tentang bagaimana Aceh menjadi negara merdeka setelah proklamasi. Pihak uleebalang menginginkan kembalinya Belanda ke Aceh, sementara ulama dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menyetujui kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sebenarnya, peristiwa Cumbok hanyalah puncak konflik politik yang terjadi di luar konflik nyata antara uleebalang dan ulama⁸.

Konflik ini sudah ada sejak Belanda menguasai Aceh, dengan dukungan kuat dari kaum bangsawan yang memberikan banyak keistimewaan kepada Belanda. Kaum *Uleebalang* mendapat keuntungan, termasuk posisi pemerintahan di Aceh dalam struktur pemerintahan Belanda. Sebaliknya, para ulama menentang Belanda dan tidak senang

⁵ Junaidi Ahmad, *Pidie Negeri 34 Uleebalang Sudut Pandang Adat Dan Pemerintahan* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020), 53.

⁶ Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat, Revolusi, Dan Hancurnya Kerajaan Di Sumatra* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 193.

⁷ Jergian Jodi, Septian Fatianda, and Randi Stiawan, "The Political Movement of The Unity of Ulama Throughout Aceh (Pusa) and Its Implications on Social and Political Life in Aceh 1939-1962," *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 9, no. 2 (2023): 234–58, <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v9i2.231>.

⁸ Reid, *Perjuangan Rakyat, Revolusi, Dan Hancurnya Kerajaan Di Sumatra*.

dengan uleebalang yang dianggap sebagai pengkhianat orang Aceh dengan sikap mempertahankan status quo⁹.

Saat Belanda memerintah, mereka menggunakan istilah "landschap" untuk menggambarkan "negeri". Mereka memimpin orang-orang di daerah mereka. Dalam praktiknya, mereka adalah jenis "raja" atau "sultan kecil" yang memiliki kekuasaan atas negeri, atau "landschap", atau kenegerian. Uleebalang laki-laki biasanya disebut "Teuku" dan uleebalang perempuan biasanya disebut "Cut". Gelar ini diberikan kepada mereka dan keluarga mereka di "wilayah otonom" yang berada di bawah kendali Sultan Aceh dan telah diwariskan secara regenerasi. Namun, Mereka tidak melakukan tugas mereka dengan baik. Namun, keluarga Sultan Aceh dikenal dengan gelar "Tuanku", "Tuwanku", dan "Pocut".¹⁰

Berangkat dari serangkaian fakta sejarah di atas, penelitian menjadi menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Adapun yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah: bagaimana kondisi sosial politik di Aceh pasca kemerdekaan Indonesia, kemudian bagaimana proses berlangsungnya perang cumbok, dan mengapa perang cumbok berdampak terhadap perubahan sosial di Aceh.

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah kajian sejarah sosial sehingga digunakan pendekatan sosial untuk melihat bagaimana perubahan sosial yang terjadi di Aceh pasca meletusnya Perang Cumbok di Aceh. Adapun metode yang digunakan adalah metode sejarah, terdapat empat langkah yang dilalui dalam metode sejarah yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi¹¹. Pada langkah pertama, heuristik merupakan proses pengumpulan sumber-sumber sejarah. Sumber primer dalam penelitian ini berasal dari dokumen arsip tentang peristiwa perang cumbok. Selain itu, sumber sekunder dari kepustakaan diambil dari literatur yang mendukung dari berbagai sumber, seperti buku, laporan studi, dan jurnal ilmiah.

Langkah kedua adalah verifikasi yang merupakan proses penyeleksian sumber-sumber yang telah dikumpulkan sebelumnya. Verifikasi ini dilakukan dengan cara kritik eksternal dan internal untuk melihat kevalidan dan keaslian sebuah sumber. Langkah ketiga adalah interpretasi yaitu proses memberikan penafsiran terhadap data yang diperoleh dari sumber sejarah. Ini dilakukan untuk mengungkapkan fakta-fakta dalam peristiwa Perang Cumbok di Aceh. Langkah terakhir adalah historiografi yaitu proses penulisan sejarah, tahap ini menjadi penting karena akan menyajikan sebuah catatan ilmiah terhadap peristiwa sejarah Perang Cumbok dan Perubahan Sosial di Aceh 1945-1946.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kondisi sosial politik di Aceh Pasca Kemerdekaan Indonesia

Aceh pada era setelah kemerdekaan adalah hasil dari peradaban yang sebelumnya pernah ditorehkan oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Salah satu hal yang membedakan

⁹ M. Nur El Ibrahimy, *Kisah Kembalinya Tgk.Moh.Daud Beureueh Ke Pangkuan Republik Indonesia* (Jakarta: M. Nur El Ibrahimy, 1980), 43.

¹⁰ Ibrahimy, 65.

¹¹ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, Penerbit Ombak (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), 14.

keduanya adalah bahwa Kesultanan Aceh Darussalam adalah negara yang berdaulat yang menerapkan undang-undang Islam. Kesultanan Aceh mencapai kemajuan pesat hingga pernah mencapai pusat ilmu pengetahuan di wilayah Asia Tenggara pada abad ke 16-17 M¹². Kesultana Aceh juga menguasai dan memerintah banyak wilayah di Sumatra dan sekitarnya. Selain itu, ada hubungan diplomatik dengan sejumlah besar negara di Eropa, Asia, dan Arab. Setengah dari pulau Sumatera dan semenanjung Malaya (Malaysia) adalah wilayah Kesultanan Aceh Darussalam ketika sangat kuat pada abad ke-16 dan ke-17, ini terbukti dari sejarahnya di selat Malaka dan hubungan diplomatiknya dengan negara-negara di seluruh dunia¹³.

Rakyat Indonesia menjadi gelisah karena Jepang menyerah kepada sekutu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pasca peristiwa ini, di Aceh juga terjadi hal yang sama. Orang-orang di Aceh umumnya gembira dengan berita bahwa Jepang kehilangan kemenangan karena menganggapnya awal baru untuk kembali ke zaman sebelum perang dengan cukup makanan dan pakaian¹⁴. Setelah Jepang dikalahkan oleh sekutu dalam perang Indonesia, yang berada di Asia Timur Raya, segera mengumumkan kemerdekaannya di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Meskipun demikian, berita proklamasi baru disampaikan secara resmi tanggal 24 Agustus 1945 di Aceh.

Ini karena Jepang berusaha mencegah berita kemerdekaan Indonesia menyebar. Sebagai bagian dari tindakan tersebut, orang Indonesia yang bekerja dilarang masuk ke perusahaan. di kantor berita Jepang (Domei), mengambil radio penduduk dan memilih berita dari surat kabar Atjeh Sinbun. Walaupun Jepang menyembunyikannya, orang Aceh yang bekerja di bagian jaringan radio dan telegraf yang dikuasai Jepang mendengarkan berita kemerdekaan melalui saluran yang memberitakan kemerdekaan Indonesia saat Jepang lengah¹⁵.

Ketika Presiden Soekarno dan wakil Presiden Moh. Hatta mengumumkan kemerdekaan Indonesia, Semua orang Aceh menyambutnya dengan senang hati. Orang Aceh percaya bahwa dengan kemerdekaan Indonesia, mereka akan memiliki kemampuan untuk menerapkan hukum Islam di wilayah yang terpencil. Perjuangan terus berlanjut; Belanda melancarkan serangan kedua. Kecuali Aceh, Belanda telah menguasai seluruh wilayah Indonesia. Dalam perang Medan Area, orang Aceh juga mempertahankan Pangkalan Brandan di Sumatra Utara¹⁶.

Masyarakat Aceh tetap optimis bahkan ketika mereka menjadi "daerah modal" bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Aceh adalah satu-satunya provinsi di mana Belanda tidak berkuasa selama Perang Belanda Pertama dan Kedua. Aceh mengorbankan banyak uang, peralatan, dan perawatan selain pertahanan. Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB),

¹² Badrun Septian Fatianda, "Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) Dan Reformasi Pendidikan Islam Di Aceh, 1939-1952," *Local History & Heritage* 2, no. 1 (2022): 24, <http://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/LHH/article/view/323>.

¹³ Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis Dan Konflik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 50.

¹⁴ T. Alibasyah Talsya, *Sedjarah Dan Dokumen Pemberontakan Di Aceh* (Jakarta: Kesuma, 1953), 4.

¹⁵ Talsya, *Sedjarah Dan Dokumen Pemberontakan Di Aceh*.

¹⁶ M. Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Bereueh Peranannya Dalam Pergolakan Di Aceh* (Jakarta: Gunung Agung, 1986), 56.

Indonesia kehilangan banyak uang, membuat Pemerintah Hindia Timur hutang hampir US\$ 1,130 juta. Sistem pemerintahan harus dioptimalkan semaksimal mungkin untuk membayar hutang tersebut dan meringankan beban keuangan pemerintah¹⁷.

Ketika Yogyakarta menjadi ibu kota Negara Indonesia, rakyat Aceh membantu dengan uang, peralatan, dan obat-obatan karena pemerintah Indonesia tidak mampu membiayai pemerintahannya lagi. Akibatnya, Soekarno berulang kali mengagumi perjuangan rakyat Aceh, seperti yang dia lakukan dalam setiap pidatonya di depan orang Aceh. Dengan bangga, dia menyatakan bahwa Aceh adalah "Daerah Modal" Republik Indonesia dan bahwa itu adalah benteng pertahanan dan tokoh yang memulai perjuangan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Pernyataan Soekarno masuk akal karena Aceh menunjukkan bahwa Belanda tidak dapat menduduki Indonesia sepenuhnya. Aceh menunjukkan bahwa wilayah Republik Indonesia masih dapat berkomunikasi dengan dunia internasional, terutama PBB. Soekarno juga mengundang pengusaha dan tokoh pejuang Aceh untuk menawarkan bantuan materil dan moral. Dia juga berharap dapat mengumpulkan dana untuk membeli pesawat Dakota RI 001, yang akan membangun Garuda Airways¹⁸.

Elit politik dan masyarakat Aceh terpecah menjadi dua setelah kemerdekaan Indonesia diumumkan. Teungku Muhammad Daud Beureuh, yang bertanggung jawab atas Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang mendukung pemerintahan Jakarta Soekarno-Hatta, memimpin kubu pertama. Teungku Muhammad Daud Cumbok, pemimpin lokal (Uleebalang), memimpin kubu kedua, menginginkan Aceh menjadi negara yang independen¹⁹. Perselisihan antara dua kubu ini menyebabkan perang saudara yang disebut Perang Cumbok, yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1946. Perang Cumbok terjadi di Aceh antara para ulama dan Uleebalang. Sejak penjajahan Belanda, kedua kelompok masyarakat ini selalu berseberangan. Selalu dianggap bahwa kelompok Uleebalang ini menentang perjuangan ulama dan para mujahidin pejuang Aceh melawan ancaman kolonialisme Belanda. Peristiwa Cumbok berubah menjadi perang saudara karena situasi ini yang sangat besar di Aceh²⁰.

b. Konfrontasi Dan Berlangsungnya Perang Cumbok

Pada 15 Oktober 1945, ulama-ulama terkenal di seluruh Aceh berkumpul di Kutaraja, menciptakan "Maklumat Ulama Seluruh Aceh" sebagai menengahi pertikaian hasil dari pro dan kontra masyarakat Aceh terhadap kemerdekaan Indonesia. Dalam pernyataan yang ditandatangani oleh Teungku H. Ahmad Hasballah Indrapuri dan Teungku M. Daud Beureueh, dinyatakan bahwasanya setiap orang muslim memiliki kewajiban hukum untuk mempertahankan kemerdekaan dan setiap gangguan terhadapnya harus dihadapi dengan perang sabil. Disebutkan juga bahwa perjuangan Teungku Cik di Tiro dan para pahlawan lain berlanjut dalam mempertahankan kemerdekaan, dan Semua orang

¹⁷ Syamsuddin Haris, *Indonesia Di Ambang Perpecahan?* (Jakarta: Erlangga, 1999), 39.

¹⁸ Abdullah Sani Usman, *Krisis Legitimasi Politik Dalam Sejarah Pemerintahan Di Aceh* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010), 191.

¹⁹ Rusdi Sufi, *Peranan Tokoh Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950 Di Aceh* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1997), 86.

²⁰ Mahmud Ibrahim, *Mujahid Dataran Tinggi Gayo* (Takengon: Yayasan Maqamanunahmuda, 2007), 162.

diminta untuk tunduk dan patuh kepada perintah yang diberikan oleh pemimpin²¹.

Fatwa ulama ini cepat tersebar di seluruh masyarakat Aceh. Tak lama kemudian, terbentuk kelompok kelaskaran untuk membantu tentara resmi di Aceh. Ulama dan pemuda PUSA bertanggung jawab atas hampir semua badan kelaskaran rakyat Aceh. Sebagian besar rakyat terpicu oleh semangat jihad fisabilillah, yang kemudian bergabung untuk mendirikan badan-badan kelaskaran tersebut. Kelaskaran rakyat lebih berorientasi pada kepentingan golongannya karena diwarnai oleh semangat Islam. Oleh karena itu, badan-badan ini tidak hanya berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga menggunakan ideologi golongan demi kelangsungan hidup golongan. Akibatnya, ini meningkatkan konflik dengan golongan uleebalang. Pihak uleebalang, yang telah ada sejak zaman kerajaan aceh, menghadapi perubahan ini, yang menimbulkan kecurigaan yang semakin besar terhadap golongan ulama²².

Keluarga *Uleebalang* bergabung dengan orang-orang yang secara genetic menikmati bentuk pemerintahan *Uleebalang* di Aceh. Mereka percaya bahwa kedudukannya akan runtuh dan kekuatan mereka menjadi usai segera. Dianggap sebagai sumber utama keruntuhan mereka adalah para ulama. Ulama dan uleebalang pro ulama menentang Belanda pada awal Oktober 1945. membentuk Pemerintah Republik di Kutaraja. Kelihatannya kaum ulama memberi kaum uleebalang peran khusus di dalam pemerintahan yang didudukinya di daerah karena mereka khawatir akan kembalinya Belanda ke Aceh²³.

Teuku Nya Arif uleebalang XXVI, Mukim Aceh besar dengan pangkat panglima Sri Imam Muda, sekarang tinggal di Aceh. Dia memiliki staf yang termasuk Daud Beureuh, ketua PUSA, yang juga bertugas sebagai anggota komite nasional daerah dan kepala Kantor Urusan Agama. Namun, ulama dengan uleebalang masih berkompetisi di pemerintah Republik, khususnya remaja. Residen Teuku Nya' Arif kemudian mendirikan API (Angkatan Pemuda Indonesia) sebagai dasar tentara nasional di residen Aceh. Kemudian diikuti IPI (Ikatan Pemuda Indonesia), lanjut berubah menjadi PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia), yang dipimpin pemuda yang berorientasi dengan PUSA²⁴.

Perang Cumbok terjadi di Pidie ketika mayoritas uleebalang menentang kemerdekaan Indonesia. Teuku Cumbok uleebalang di daerah tersebut memandang perjuangan untuk kemerdekaan tanah air kita Indonesia sebagai leceh, menurut Abdullah Arif, wartawan Semangat Merdeka. Selain itu, pada 12 Oktober 1945, Teuku Daud Cumbok melarang banyak orang mengibarkan bendera merah putih di depan kantor gunco Lammeulo²⁵. Pada 22 Oktober 1945, semua uleebalang Pidie, kecuali Teuku Bentara Pineung, berkumpul di rumah Teuku Umar Keumangan di Beureunun. Salah satu tujuan

²¹ Abdullah Arif, *Di Sekitar Peristiwa Penghianat Tjoembok* (Banda Aceh: Semangat Merdeka, 1946), 5.

²² Akmal Nasery Basral, *Napoleon Dari Tanah Rencong: Sebuah Novelisasi Perjuangan Hasan Saleh* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 144.

²³ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureueh Dalam Pergolakan Aceh* (Jakarta: Media Dakwah, 2001), 115.

²⁴ Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi Di Serambi Mekah: Perjuangan Kemerdekaan Dan Pertarungan Politik Di Aceh 1945 1949* (Jakarta: UI Press, 1998), 143.

²⁵ Jodi, Fatianda, and Stiawan, "The Political Movement of The Unity of Ulama Throughout Aceh (Pusa) and Its Implications on Social and Political Life in Aceh 1939-1962," 225.

dari pertemuan ini adalah untuk membicarakan kondisi Aceh saat ini dan prospek masa depan. Keputusan dibuat pada pertemuan untuk membangun markas di Uleebalang²⁶.

Kebijakan membangun Markas Uleebalang menunjukkan ketidakpercayaan diri kaum Uleebalang. Banyak orang bergabung dengan kelompok paramiliter yang mendukung PUSA, seperti PRI, Barisan Hisbullah, dan Barisan Mujahidin. karena situasi yang tidak menentu dan harapan besar akan kembalinya Belanda. Mengingat hubungan lama mereka dengan ulama, Keterlibatan ulama PUSA dapat dianggap sebagai bahaya, dan meskipun uleebalang sekarang setelah diangkat sebagai wedana oleh penduduk Aceh di wilayah mereka, uleebalang masih merasa perlu untuk bergerak. Setelah itu, kedua belah pihak menggunakan kekerasan dan persuasi untuk mengambil alih senjata api peneinggalan Jepang. Sebagai contoh, Teuku M. Daud Cumbok dipilih sebagai pimpinan Markas Uleebalang karena dia berhasil mendapatkan banyak senjata Jepang dari wilayah Lammeulo yang dia pimpin.²⁷

Markas Uleebalang mulai bertindak pada tanggal 25 Oktober 1945, memutuskan untuk menangkap segelintir pemuda yang bertanggung jawab mengawal kantor pos dan kantor telepon Lam Meulo. Setelah mereka memperoleh Lam Meulo sebagai basis pertahanan, Uleebalang mengirimkan pasukan ke Garut menjadi pusat perjuangan PUSA dan PRI. Pada tanggal 8 November 1945, Uleebalang mengambil alih bangunan perjumpaan pemuda-pemuda PRI di Lammeulo. Tempat itu dibersihkan dari orang-orang yang terlibat dalam organisasi perjuangan kemerdekaan dan anggota mereka. Pemerintah daerah mencoba mengirim perwakilan ke Markas Uleebalang untuk mencegah hal ini terjadi. dan perwakilan tersebut bahkan mendapat perlakuan yang tidak pantas²⁸.

Situasi menjadi semakin buruk ketika pertemuan dibuka kembali oleh Mark Hasil dari pertemuan ini adalah bahwa mereka akan bertindak tegas terhadap mereka yang tidak setuju dengan tindakan ini. Malam hari setelah kejadian 10 dan 11 Desember 1945, pasukan dari Markas Uleebalang kembali menyerang rumah-rumah di Lam Meulo, tempat pimpinan Pemuda Republik Indonesia (PRI) berada. Di antaranya adalah rumah Teungku Zainal Abidin, Hasan Mohammad dari keluarga Teungku Umar Tiro, dan Teungku Sulaiman, yang masing-masing adalah bendaharawan, ketua I, dan ketua Badan Keamanan Pemuda Republik Republik Indonesia di *lam Meulo*²⁹.

Untuk mengantisipasi hal ini, para Pada tanggal 22 Desember, para ulama dan pemudanya berkumpul di Garut, Kabupaten Pidie, segera membangun Badan Perjuangan Rakyat, juga dikenal sebagai Markas Besar Rakyat Umum (MBRU). Tujuan organisasi ini adalah untuk memperkuat barisan rakyat di Kabupaten Pidie untuk melawan golongan Cumbok. Dengan bantuan pemuda dan ulama dari Pidie, Hasan Ali ditunjuk sebagai pemimpin MBRU secara keseluruhan. Dalam menghadapi masalah perang saudara yang semakin memburuk Pada 6 Januari 1946, Pemerintah Daerah Aceh menyelenggarakan sidang pertama di Markas TKR Daerah Aceh. Pada tanggal 8 Januari 1946, sidang tersebut dilanjutkan lagi. Menurut laporan badan penyelidikan, informasi dikirim ke Markas

²⁶ Aris, *Di Sekitar Peristiwa Penghianat Tjoembok*, 5.

²⁷ Syamsuddin, *Revolusi Di Serambi Mekah: Perjuangan Kemerdekaan Dan Pertarungan Politik Di Aceh 1945 1949*, 146.

²⁸ Syamsuddin, 132.

²⁹ Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureueh Dalam Pergolakan Aceh*, 118.

Uleebalang di Lam Meulo³⁰.

Informasi tertulis dengan terbuka menyatakan mereka yang memegang senjata di Cumbok dan tempat lain melawan masyarakat umum adalah penghianat negara dan bangsa. Namun, isi ultimatum meminta mereka untuk menyerah. Pada tanggal 13 Januari 1946, pasukan pemerintah dan pengikutnya berhasil mengambil alih Markas Uleebalang di Lam Meulo. Saat Lam Meulo runtuh, MBRU kemudian mengumumkan bahwa Markas Uleebalang di Lam Meulo kehilangan kekuatan. Selain itu, dilarang untuk mengambil atau mengubah apa pun yang dimiliki Uleebalang. Teuku Muhammad Daud Cumbok dan rekannya yang melarikan diri berhasil ditangkap di Gunung Seulawah pada 16 Januari 1946. Dibawa ke Sigli, mereka kemudian diangkut ke MBRU di Garot. Setelah itu, mereka dikirim kembali ke Sanggeue untuk dihukum mati³¹.

c. Dampak Perang Cumbok Terhadap Perubahan Sosial di Aceh

Daerah seluruh Aceh, kekuasaan uleebalang hancur karena kepemimpinan ulama dalam memobilisasi kekuatan anti Cumbok. Kedudukan uleebalang di Aceh semakin lemah setelah perang Cumbok berakhir. Sekarang kaum ulama yang menang perang mengambil alih kedudukannya sebagai pemimpin adat, yang bertahan selama bertahun-tahun, jika tidak berabad-abad. Proses pembersihan uleebalang tersebar di seluruh Aceh, bukan hanya di wilayah Pidie. Semacam kudeta dilakukan oleh kelompok yang menentang uleebalang terhadap kedua pemerintah sipil dan militer residen Aceh. Teungku Amir Husin Al Mujahid mengkoordinir pasukannya memburu seluruh uleebalang termasuk pemimpin militer dan pemerintahan. Teuku Alibasyah wedana Langsa dan Teuku Pidie, asisten residen Aceh timur, ditangkap dan kemudian dibunuh oleh kelompok PUSA atas tuduhan mendukung pergerakan Teuku Daud Cumbok³².

Perang Cumbok, yang menghapus golongan uleebalang dari kekuasaan, hanyalah awal dari banyak peristiwa yang akan terjadi setelahnya. Setelah Perang Cumbok, beberapa radikal Ulama PUSA, termasuk Amir Husin Al Mujahid, yang tidak senang dengan fakta bahwa banyak bangsawan masih menjabat sebagai wedana di luar daerah Pidie. Menurut kubu ini, penghancuran golongan uleebalang di Pidie dan berbagai perubahan yang diikutinya belum cukup untuk menghilangkan semua kaum dicap sebagai "sisa-sisa uleebalang" di seluruh Aceh. Dengan demikian, semua orang dari Aceh yang dianggap sebagai "sisa uleebalang". Dengan demikian, Amir Husin Al Mujahid mendirikan Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) di Idi, Aceh Aceh Timur pada awal Februari tahun 1946³³.

Meskipun dipimpin oleh anggota PUSA, Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) longgar dalam perekrutan anggota dan pembiayaan. Ini karena TPR membutuhkan dukungan militer yang signifikan untuk memenuhi tujuannya, yaitu "mengunduh sisa-sisa uleebalang." Dengan demikian, TPR menerima orang yang ingin bergabung tanpa melakukan pemeriksaan sebelumnya. alasan mereka untuk bergabung dengan TPR Konflik saudara berlanjut setelah perang cumbok berakhir. Peristiwa cumbok menyebabkan insiden

³⁰ Junaidi Ahmad, *Prang Cumbok : Revolusi Sosial Di Luhak Pidie* (Banda Aceh: yayasan pena, 2021), 134.

³¹ Ahmad, 34.

³² Muhammad Iskandar, *Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000), 105.

³³ Nazaruddin Syamsuddin, "Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh," 1990, 27.

berdarah yang lebih mengerikan. Uleebalang merasa sangat khawatir di berbagai tempat yang tidak terkait dengan peristiwa Cumbok setelah keluarga mereka dibantai di Pidie. Pemimpin PUSA di tempat lain merasa khawatir karena tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan anggota muda PUSA yang semakin ingin menghancurkan semua uleebalang di Aceh³⁴.

Kaum Uleebalang menganggap pihaknya sebagai representasi feodalisme dan menganggap bahwa mereka adalah representasi awal demokrasi Aceh Tidak diduga, Peristiwa bersenjata Uleebalang Cumbok menyebabkan kemarahan massal yang menyebar ke keluarga Uleebalang lainnya, termasuk Uleebalang dan keluarganya sendiri yang telah berperan penting dalam mempertahankan Republik pada awal kemerdekaan ini juga menjadi korban. Massa menjadi tidak terkendali dan merusak nyawa dan harta benda. Jumlah korban berguguran tidak diketahui. Banyak orang meninggal tanpa dikubur, dan banyak keluarga Uleebalang terpaksa menghilangkan identitas gelar Teuku nya demi keselamatan mereka sendiri.³⁵

Revolusi sosial tahap kedua dimulai dengan kekacauan di Aceh timur. Amir Husin Al Mujahid memimpin TPR (Tentara Perjuangan Rakyat) untuk membasmi seluruh uleebalang di Aceh di Idi Rayeuk di Aceh timur. Amir Husin Al Mujahid bertindak sebagai panglima revolusi dalam organisasi tersebut. Pemerintahan kehilangan posisi karena penangkapan bangsawan dan pejabat sekuler lainnya. Dalam hal ini, Al Mujahid menempatkan orang berorientasi pada PUSA untuk menggantikan pejabat bekas kepemimpinan Uleebalang, atas rekomendasi pemimpin-pemimpin PUSA setempat. Komponen PUSA sendiri didorong untuk mendukung pergerakan Al Mujahid, sehingga TPR menjadi jauh lebih kuat ketika ia mendekati Kutaraja daripada ketika ia berangkat dari Aceh timur.

Perang Cumbok membunuh sekitar 98 bangsawan. Jumlah puluhan orang yang meninggal dalam ekspedisi TPR dari Februari hingga Maret 1946 tidak termasuk dalam data. Selama masa lalu, ulama dan uleebalang bekerja sama untuk membangun peradaban Aceh, sehingga peristiwa tragis ini merupakan malapetaka bagi seluruh rakyat Aceh. Namun, kedua kelompok tersebut diadudomba satu sama lain setelah kedatangan Belanda. Setelah mereka memiliki kemerdekaan, mereka saling curiga satu sama lain, yang menyebabkan pertumpahan darah.³⁶

Berakhirnya perang Cumbok di Aceh, Sebagai pemimpin pemerintahan Aceh selama berabad-abad, kekuatan dan otoritas golongan uleebalang semakin lemah. Golongan ulama yang menang dalam perang sekarang memiliki kekuatan otomatis. Itu sebabnya tidak mengherankan bahwa sebagian besar anggota ulama akhirnya menduduki jabatan pemerintahan di Aceh Selain itu, namanya diubah menjadi Kota Bhakti karena Lam Meulo adalah pusat Perang Cumbok dan dianggap sebagai pemerintahan feodal. Sebelum ini, wilayah-wilayah ini diperintahkan oleh uleebalang dalam sistem monarki absolut tipe kecil Belanda, tetapi sekarang diperintahkan oleh camat dalam sistem demokrasi yang dibuat oleh UU 1945.

³⁴ Hamid Jabbar. Sjamaun Gaharu Ramadhan KH, *Cuplikan Perjuangan Di Daerah Modal* (Jakarta: pustaka harapan, 1995), 248.

³⁵ Ahmad, *Pidie Negeri 34 Uleebalang Sudut Pandang Adat Dan Pemerintahan*, 172.

³⁶ Ahmad, *Pidie Negeri 34 Uleebalang Sudut Pandang Adat Dan Pemerintahan*.

Hasil Penyegaran dan pendemokrasian masyarakat Aceh adalah konsekuensi langsung dari peristiwa Cumbok. Dengan munculnya birokrasi baru, ukuran kekuasaan dan status pemimpin telah berubah. Uleebalang adalah pusat kepemimpinan masyarakat Aceh. Kepemimpinan bergantung pada garis keturunan dan kekerabatan. Namun, konflik yang terjadi telah menyebabkan pergeseran kepemimpinan formal dari bangsawan ke ulama, terutama ulama PUSA dan kaum uleebalang. Status keluarga Uleebalang sebagai bangsawan yang terhormat dan berkuasa telah diubah oleh pembantaian yang terjadi selama konflik tersebut³⁷.

KESIMPULAN

Perang Cumbok adalah puncaknya dari konflik lama antara uleebalang dan ulama. Selama pemerintahan Aceh, politik pecah belah Belanda telah memicu permusuhan antara ulama dan uleebalang. Ini mulai dari rasa tidak percaya satu sama lain dan pada akhirnya mengarah pada permusuhan dan konflik yang berkelanjutan antara kedua golongan ini. Ketegangan ini meningkat saat kedua kelompok bertempur di Pidie antara 4 Desember 1945 dan 16 Januari 1946. Struktur sosial Aceh berubah pasca peristiwa Cumbok, dan status kaum uleebalang menjadi hilang.. posisinya sebagai pemimpin adat, yang telah disandanginya selama berabad-abad, kini diambil alih oleh ulama dan pemerintah Aceh. Pemerintahan Aceh, yang sebelumnya dipimpin oleh uleebalang, kini dipimpin oleh bupati dan camat sesuai dengan sistem demokrasi yang ditetapkan oleh UU 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

REFERENSI

- Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Penerbit Ombak. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Ahmad, Junaidi. *Pidie Negeri 34 Uleebalang Sudut Pandang Adat Dan Pemerintahan*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020.
- . *Prang Cumbok : Revolusi Sosial Di Luhak Pidie*. Banda Aceh: yayasan pena, 2021.
- Alfian, T. Ibrahim. *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999.
- Aris, Abdullah. *Di Sekitar Peristiwa Penghianat Tjoembok*. Banda Aceh: Semangat Merdeka, 1946.
- Basral, Akmal Nasery. *Napoleon Dari Tanah Rencong: Sebuah Novelisasi Perjuangan Hasan Saleh*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Haris, Syamsuddin. *Indonesia Di Ambang Perpecahan?* Jakarta: Erlangga, 1999.
- Hugronje, Snouck. *Aceh Di Mata Kolonialis*. Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.
- Ibrahim, Mahmud. *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*. Takengon: Yayasan Maqamanunahmuda, 2007.
- Ibrahimi, M. Nur El. *Kisah Kembalinya Tgk.Moh.Daud Beureueh Ke Pangkuan Republik Indonesia*. Jakarta: M. Nur El Ibrahimi, 1980.
- . *Peranan Tgk. M. Daud Beureueh Dalam Pergolakan Aceh*. Jakarta: Media Dakwah, 2001.
- . *Teungku Muhammad Daud Bereueh Peranannya Dalam Pergolakan Di Aceh*. Jakarta: Gunung Agung, 1986.

³⁷ Ibrahimi, *Peranan Tgk. M. Daud Beureueh Dalam Pergolakan Aceh*, 132.

- Iskandar, Muhammad. *Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000.
- Jodi, Jergian, Septian Fatianda, and Randi Stiawan. "The Political Movement of The Unity of Ulama Throughout Aceh (Pusa) and Its Implications on Social and Political Life in Aceh 1939-1962." *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 9, no. 2 (2023): 234–58. <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v9i2.231>.
- Langen, K.F.H. Van. *Susunan Pemerintahan Aceh Pada Masa Kesultanan*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2002.
- Ramadhan KH, Hamid Jabbar. Sjamaun Gaharu. *Cuplikan Perjuangan Di Daerah Modal*. Jakarta: pustaka harapan, 1995.
- Reid, Anthony. *Perjuangan Rakyat, Revolusi, Dan Hancurnya Kerajaan Di Sumatra*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Septian Fatianda, Badrun. "Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) Dan Reformasi Pendidikan Islam Di Aceh, 1939-1952." *Local History & Heritage* 2, no. 1 (2022): 23–30. <http://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/LHH/article/view/323>.
- Sufi, Rusdi. *Peranan Tokoh Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950 Di Aceh*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1997.
- Syamsuddin, Nazaruddin. "Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh," 1990.
- . *Revolusi Di Serambi Mekah: Perjuangan Kemerdekaan Dan Pertarungan Politik Di Aceh 1945 1949*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Talsya, T. Alibasyah. *Sedjarah Dan Dokumen Dokumen Pemberontakan Di Aceh*. Jakarta: Kesuma, 1953.
- Usman, Abdul Rani. *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis Dan Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Usman, Abdullah Sani. *Krisis Legitimasi Politik Dalam Sejarah Pemerintahan Di Aceh*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektor Keagamaan, 2010.